

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan II 2026, tingkat inflasi *month-to-month* (m-to-m) Provinsi Sulawesi Utara tercatat mengalami lonjakan sebesar 2,12%, sementara inflasi *year-to-date* (y-to-d) berada di angka 4,48%, dan inflasi *year-on-year* (y-o-y) menyentuh 3,83%.

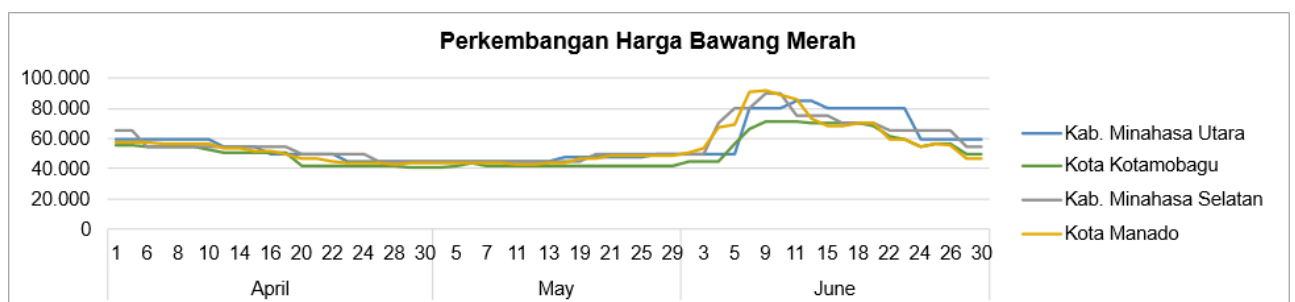
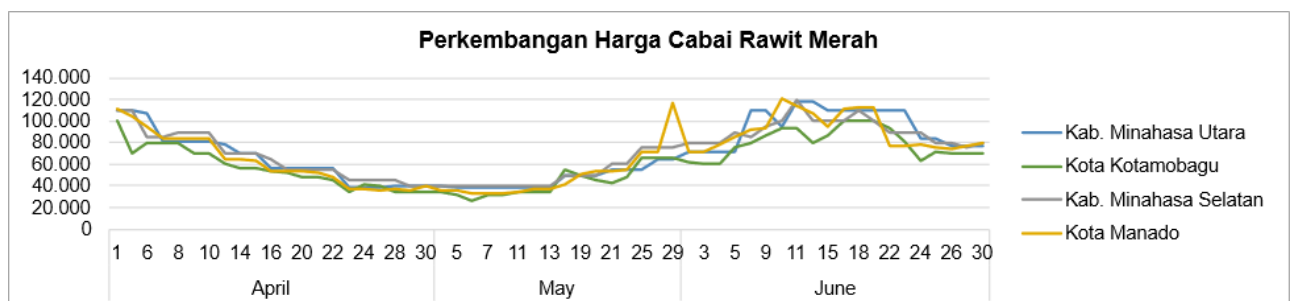
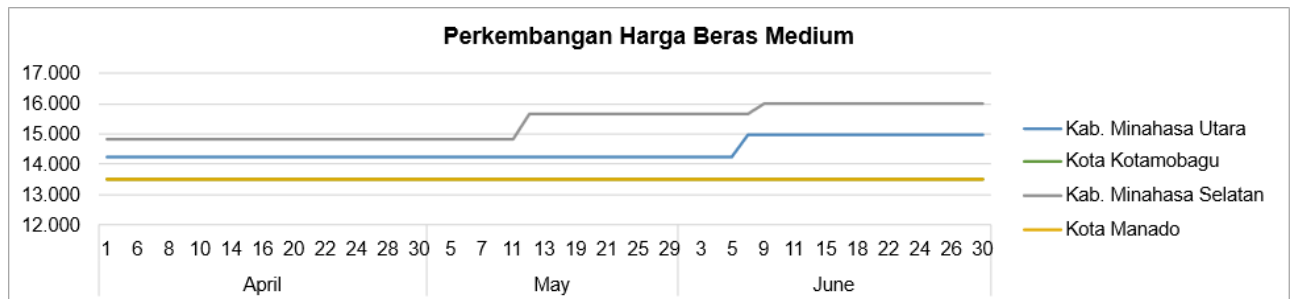
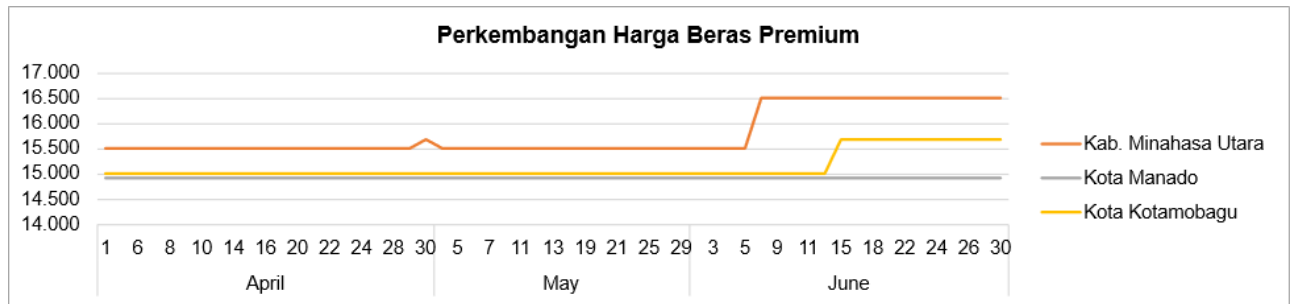
Berdasarkan empat kabupaten/kota pencatatan IHK di Sulawesi Utara, seluruh wilayah mengalami tekanan inflasi secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan (m-to-m), Kabupaten Minahasa Selatan mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,84% (pendorong utama: cabai rawit 1,54%; penahan: tomat -0,13%), diikuti Kabupaten Minahasa Utara sebesar 2,83% (pendorong utama: cabai rawit 1,84%; penahan: daging ayam ras -0,12%), Kota Kotamobagu sebesar 2,14% (pendorong utama: cabai rawit 1,31%; penahan: emas perhiasan -0,02%), dan Kota Manado sebesar 1,72% (pendorong utama: cabai rawit 0,57%; penahan: ikan mujair -0,01%).

Sementara itu, secara tahunan (y-on-y), tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kota Manado sebesar 4,25% dengan andil pendorong utama dari emas perhiasan (0,67%) dan penahan berupa daging babi (-0,20%). Kota Kotamobagu membukukan inflasi y-o-y sebesar 3,75% (pendorong utama: emas perhiasan 0,71%; penahan: daging babi -0,05%), disusul Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 3,58% (pendorong utama: ikan cakalang/ikan sisik 0,54%; penahan: daging babi -0,84%), dan Kabupaten Minahasa Utara sebesar 2,78% (pendorong utama: cabai rawit 0,71%; penahan: daging babi -0,44%).

Secara agregat tahun ke tahun (y-o-y) provinsi, komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi terbesar pada akhir triwulan II ini meliputi emas perhiasan (0,52%), cabai rawit (0,43%), angkutan udara (0,37%), bawang merah (0,25%), dan daun bawang (0,20%). Sebaliknya, komoditas yang menjadi penahan laju inflasi tahunan antara lain daging babi (-0,33%), tomat (-0,03%), gaun/terusan wanita (-0,02%), buku tulis bergaris (-0,02%), dan minuman ringan (-0,02%).

Untuk komoditas yang memicu lonjakan inflasi bulanan (m-to-m) secara signifikan didominasi oleh cabai rawit dengan andil mencapai 1,01%, disusul oleh bawang merah (0,33%), beras (0,20%), angkutan udara (0,09%), dan bensin (0,07%). Adapun kelompok komoditas yang berfungsi sebagai penahan inflasi bulanan meliputi daging ayam ras (-0,04%), telur ayam ras (-0,03%), tomat (-0,02%), cumi-cumi (-0,01%), dan ikan mujair (-0,01%).

Tingginya tingkat inflasi di Sulawesi Utara juga dipengaruhi oleh struktur pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan Diagram Timbang Survei Biaya Hidup 2022, komoditas-komoditas pendorong utama inflasi memiliki bobot konsumsi daerah yang lebih tinggi dibandingkan bobot nasional seperti cabai rawit (1,07%) sekitar 3,2 kali lipat dari nasional (0,33%), beras (5,28%) sekitar 1,5 kali lipat dari nasional (3,43%), serta bawang merah (0,76%) sekitar 1,5 kali lipat dari nasional (0,51%). Pada kelompok *administered price*, bobot konsumsi angkutan udara Sulawesi Utara (1,0705%) juga sekitar 1,5 kali lipat lebih tinggi dari nasional (0,7215%).



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Lonjakan tekanan inflasi di Provinsi Sulawesi Utara pada akhir Triwulan II dipicu oleh kombinasi gangguan pasokan komoditas pangan utama akibat faktor cuaca, bencana alam, serta peningkatan biaya produksi dan logistik.

Komoditas cabai rawit mengalami lonjakan harga bulanan yang sangat ekstrem mencapai 86,1% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 1,83% (mtm). Peningkatan ini dipicu oleh terganggunya rantai pasok dari wilayah luar daerah akibat bencana alam, yakni banjir bandang dan curah hujan tinggi di Gorontalo, serta guncangan gempa bumi di Palu yang merupakan wilayah pemasok utama cabai rawit bagi Sulawesi Utara. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pasokan dari internal provinsi. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, produksi terhambat secara signifikan akibat tingginya curah hujan. Sementara di Kabupaten Minahasa Selatan, hasil panen lebih banyak terserap ke luar daerah akibat tingginya

permintaan dan disparitas harga yang lebih menguntungkan bagi petani. Keterbatasan pasokan dari berbagai lini ini pada akhirnya mempersempit ketersediaan di pasar domestik dan memicu lonjakan harga yang signifikan.

Bawang merah mencatatkan kenaikan harga sebesar 41,93% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,33% (mtm). Permasalahan utama bersumber dari minimnya pasokan dari wilayah penyuplai utama, yaitu Bima dan Enrekang. Sebagian besar pasokan dari Bima dialihkan dan terserap oleh provinsi lain, sementara jalur distribusi menuju Sulawesi Utara masih terkendala oleh belum tersedianya akses tol laut langsung dari Bima. Di sisi lain, volume produksi dari Enrekang merosot akibat penguatan dampak kemarau El-Nino yang disertai dengan maraknya serangan hama ulat di area pertanian.

Komoditas beras mengalami kenaikan harga sebesar 3,06% (mtm) dengan kontribusi andil sebesar 0,20% (mtm). Kenaikan harga pada bulan Juni 2026 ini diidentifikasi didorong oleh tiga faktor utama: (i) melonjaknya harga pupuk urea yang dipengaruhi oleh krisis komoditas global, (ii) naiknya biaya pengemasan akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang merupakan bahan baku utama plastik, serta (iii) kenaikan harga BBM jenis Solar dan Marine Diesel Fuel yang secara langsung meningkatkan beban biaya logistik dan distribusi antarwilayah.

Tekanan inflasi pada angkutan udara didorong oleh kenaikan tarif transportasi udara. Peningkatan harga tiket pesawat tersebut dipicu oleh lonjakan permintaan jasa penerbangan secara signifikan, seiring dengan momentum memasuki periode libur sekolah pada bulan Juni.

Inflasi pada komoditas bensin dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi sepanjang bulan Juni 2026. Tercatat pada tanggal 1 Juni 2026, terjadi kenaikan harga pada produk Pertamina Turbo. Selanjutnya, tekanan inflasi kembali bertambah menyusul kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertamina yang diberlakukan pada tanggal 10 Juni 2026.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sepanjang Triwulan II 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara bersama TPID Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara secara aktif mengimplementasikan berbagai program intervensi strategis. Langkah-langkah pengendalian tersebut diintegrasikan secara komprehensif melalui kerangka kerja strategi 4K, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- Keterjangkauan Harga (K1): Dalam menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan tingkat harga di pasar retail, TPID tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara masif menyelenggarakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tersebar di berbagai titik wilayah Sulawesi Utara sepanjang triwulan II (April hingga Juni 2026).
- Ketersediaan Pasokan (K2): Guna memitigasi risiko defisit stok pangan, khususnya komoditas strategis hortikultura dan beras, telah dilaksanakan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) secara *business-to-business* (B2B) antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Selain itu, aspek ketersediaan pasokan diperkuat melalui peningkatan kapasitas produksi dengan penyelenggaraan Pelatihan Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) Tahap I, Sekolah Lapang Iklim bersinergi dengan BMKG, serta penyerahan sarana prasarana demplot dan alsintan kepada kelompok PATUA. TPID juga melakukan Pelatihan *Onboarding* UMKM *Go Digital* Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA) untuk hilirisasi produk sambal

dan perikanan, serta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Bantuan Pangan dan Penyaluran Beras SPHP.

- Kelancaran Distribusi (K3): Untuk menjamin kelancaran jalur logistik bahan pokok di daerah, TPID melakukan langkah pengawasan lapangan melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan dan distribusi LPG Tabung 3 kg serta sidak pengisian bahan bakar jenis Solar di berbagai SPBU.
- Komunikasi Efektif (K4): Penguatan aspek koordinasi dan penyamaan persepsi kebijakan ditempuh melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Neraca Pangan Strategis, serta Rapat Koordinasi Triwulan & Rapat Teknis TPID Provinsi yang secara khusus membahas penanganan inflasi. Langkah komunikasi strategis ini diperkuat dengan serangkaian agenda *High Level Meeting* (HLM) di tingkat daerah, meliputi HLM TPID Kota Tomohon, HLM TPID Kab. Bolaang Mongondow Timur, HLM TPID Kab. Bolaang Mongondow Selatan, dan HLM TPID Kota Bitung. Selain itu, edukasi belanja bijak dilakukan melalui Diseminasi Bijak Belanja bersama Dharma Wanita Persatuan Pemprov Sulut, serta pelaksanaan *Capacity Building* TPID terkait penguatan produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Legian, Bali.

Sebagai rincian dari implementasi strategi di atas, berikut disajikan rangkuman rangkaian upaya konkret pengendalian inflasi yang dijalankan secara berkala dari bulan April hingga Juni 2026:

Upaya Pengendalian Inflasi April 2026

- Inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan dan distribusi LPG Tabung 3 kg;
- Akselerasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan;
- Pengawasan berkala harga komoditas harian oleh Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka momentum HBKN Paskah di Aula Gereja GMIM Siloam Dendengan Luar, Kota Manado pada 14 April 2026;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Neraca Pangan Strategis oleh Dinas Ketahanan Pangan pada 15 April 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka HBKN Paskah bertempat di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa, Kota Manado pada 16 April 2026;
- Pemeliharaan komunikasi efektif oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara bersama koordinator pedagang perantara di Pasar Bersehati Manado;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Maesa, Paal II, Kota Manado pada 22 April 2026;
- Penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) TPID Kota Tomohon Tahun 2026 pada 23 April 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Gereja GMIM Yordan Ranotana Weru, Kota Manado pada 30 April 2026;
- Integrasi sistem satu data pemantauan harga harian di 15 Kabupaten/Kota.

Upaya Pengendalian Inflasi Mei 2026

- Pemberian dukungan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) bagi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara s.d. Mei 2026;
- Penyelenggaraan Pelatihan Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) Tahap I serta

Sekolah Lapang Iklim yang dilaksanakan secara bersinergi dengan BMKG pada 5-7 Mei 2026;

- Pelaksanaan Pelatihan *Onboarding* UMKM *Go Digital* Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA) yang ditujukan bagi pelaku UMKM produk hilirisasi sambal dan sektor perikanan pada 5-7 Mei 2026;
- Penyerahan bantuan sarana prasarana (sarpras) demplot serta alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada 10 kelompok PATUA pada 11 Mei 2026;
- Penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada 19 Mei 2026;
- Penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada 20 Mei 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Lurah Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado pada 21 Mei 2026;
- Penyebarluasan (diseminasi) program Bijak Belanja melalui agenda Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Organisasi dan Rumah Tangga Secara Bijak, berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Pemprov Sulawesi Utara pada 25 Mei 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Camat Wenang, Kota Manado pada 26 Mei 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Masjid Sabibul Muhtadin, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado pada 26 Mei 2026;
- Pengawasan berkala harga pasar harian oleh Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Integrasi sistem satu data pemantauan harga harian di 15 Kabupaten/Kota.

Upaya Pengendalian Inflasi Juni 2026

- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Masjid Darul Ardam Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado pada 4 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Gereja GMIM Patmos, Sea II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa pada 4 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Gereja GMIM Pniel Kakaskasen, Kota Tomohon pada 6 Juni 2026;
- Pelaksanaan agenda *Capacity Building* TPID dengan tema "Sinergi Penguatan Produksi, Pasca Panen, dan Distribusi untuk Penguatan Pengendalian Inflasi Pangan" di Legian, Bali pada 10 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Gereja Katolik Santo Antonius, Paal IV, Kota Manado pada 11 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Masjid Thuurul Argam, Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado pada 11 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Kinilow, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon pada 18 Juni 2026;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara mengenai Percepatan Bantuan Pangan dan Penyaluran Beras SPHP pada 17 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Talete Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon pada 18 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kampus IAIN, Kota Manado pada 23 Juni 2026;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara

- mengenai Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah pada 24 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Watumea, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa pada 24 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Kolongan Satu, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa pada 25 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Seretan, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa pada 25 Juni 2026;
- Penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) TPID Kota Bitung Tahun 2026 pada 26 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Kadoodan, Kota Bitung pada 30 Juni 2026;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Madidir Ure, Kota Bitung pada 30 Juni 2026;
- Pengawasan berkala harga pasar harian oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Inspeksi mendadak (sidak) pengisian bahan bakar jenis Solar di berbagai SPBU guna menjamin kelancaran jalur distribusi logistik;
- Integrasi sistem satu data pemantauan harga harian di 15 Kabupaten/Kota.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2026 dihadapkan pada tantangan besar, tercermin dari capaian inflasi *year-on-year* (y-o-y) pada bulan Juni 2026 yang tercatat sebesar 3,83%, atau berada di atas rentang sasaran target nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Meskipun demikian, tekanan inflasi mulai menunjukkan tren stabilisasi pada akhir Triwulan II, di mana pergerakan harga komoditas *volatile foods* utama seperti cabai rawit merah dan bawang merah mulai bergerak turun dari titik puncaknya. Penurunan harga bawang merah berjalan seiring dengan kembali normalnya pasokan dari pihak pemasok. Sementara itu, melandainya harga cabai rawit merah turut dipengaruhi oleh masuknya pasokan alternatif dari Makassar dan Surabaya yang volumenya mencapai 10 ton per hari; meskipun masyarakat Manado secara umum lebih menyukai komoditas cabai rawit asal Gorontalo, kehadiran pasokan luar daerah dalam jumlah signifikan tersebut efektif menjadi alternatif yang meredam volatilitas harga di tingkat eceran.

Di sisi lain, komoditas beras (Premium dan Medium) terpantau belum mengalami penurunan harga yang signifikan dan masih tertahan di level tinggi. Namun, upaya intensif secara konsisten terus dilakukan oleh TPID melalui percepatan distribusi pangan, optimalisasi penyaluran bantuan beras SPHP, serta intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen penunjang guna menjaga ekspektasi psikologis pasar.

Terkait dengan komoditas bensin yang berada dalam kelompok *administered prices*, intervensi langsung TPID secara regulasi memang terbatas akibat sifat kebijakannya yang berada pada ranah makro/nasional. Kendati demikian, langkah mitigasi konkrit yang ditempuh melalui pelaksanaan sidak terpadu pengisian Solar di SPBU sepanjang bulan Juni bertindak sebagai salah satu faktor pengendali kelancaran distribusi logistik. Langkah mitigasi ini terbukti krusial dalam memitigasi potensi efek rembetan (*multiplier effect*) yang lebih parah terhadap rantai distribusi komoditas pangan pokok lainnya di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Sulawesi Utara.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga komoditas strategis seperti komoditas cabai rawit, bawang merah, dan tomat yang menunjukkan gejolak harga. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan GPM dengan prinsip 4T (Tepat Lokasi, Tepat Sasaran, Tepat Komoditas, Tepat Waktu) untuk pengendalian harga dan memberikan sinyal kecukupan pasokan. Lebih lanjut, peran kios TPID di pasar pemantauan PIHPS dapat dioptimalkan untuk penerapan HAP & HET bagi produk-produk pangan strategis.
- Melaksanakan sidak pasar tradisional dan modern berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Saber Pangan) untuk memantau ketidakwajaran harga, gangguan distribusi, dan penimbunan bahan pokok.
- Mengidentifikasi daerah penyangga komoditas melalui Neraca Pangan Nasional untuk mendorong KAD dalam pemenuhan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.
- Menyusun kalender tanam yang terintegrasi dengan mempertimbangkan kondisi iklim, ketersediaan air, serta proyeksi kebutuhan pasar, disertai pemberian skema insentif bagi petani yang mengikuti kalender tanam yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal panen akibat ketidaksesuaian waktu tanam, serta memastikan prediktabilitas dari arus produksi komoditas penyumbang inflasi.
- Melakukan pemetaan daerah simpul distribusi serta penanganan kendala logistik komoditas hortikultura, khususnya pada wilayah dengan ketergantungan pasokan yang tinggi, guna menjaga kelancaran arus barang dan menekan peningkatan biaya distribusi.
- Meskipun belum terdapat penyesuaian harga BBM subsidi, tingginya antrean di sejumlah SPBU berpotensi meningkatkan konsumsi BBM secara tidak produktif akibat kendaraan yang harus mengantre dalam waktu lama. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyesuaian jam operasional SPBU pada periode tertentu, seperti membuka layanan lebih awal dan menutup lebih lama, guna mengurangi kepadatan antrean, meningkatkan kelancaran distribusi, serta meminimalkan pemborosan BBM yang timbul akibat waktu tunggu yang berkepanjangan. Lebih lanjut, diperlukan koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan penyediaan kuota BBM.
- Memperkuat komunikasi kebijakan dan himbauan bijak belanja serta stop boros pangan kepada masyarakat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, sehingga tidak memicu perilaku belanja berlebihan yang berpotensi menekan harga.